



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT KERJA : PLN KANTOR PUSAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WAHYU AHADI ROUZI
2. Jabatan : SENIOR SPECIALIST II TEKNOLOGI INFORMASI (PLT EXECUTIVE VICE PRESIDENT SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI)
3. NHK : 418987

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.817.255.873

1. Tanah dan Bangunan Seluas 269 m2/108 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
2. Tanah Seluas 367 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/107 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.317.255.873

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 500.200.000

1. MOBIL, MAZDA R2 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 200.000
3. MOBIL, CRV PRESTIGE Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 180.043.600

D. SURAT BERTAHAP Rp. 500.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.648.808.301

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 5.646.307.774

III. HUTANG Rp. 177.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 5.469.307.774

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.